

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia semakin berkembang dan dinamis ditandai dengan banyaknya aktifitas manusia seperti ada yang berdagang, bertani, bersekolah ada yang bekerja dikantor dan banyak lagi lainnya, hal tersebut tidak terlepas dari dua hal yaitu transportasi dan telekomunikasi informasi. Manusia yang aktif dan dinamis dalam hidupnya tentu amat tergantung pada dua hal tersebut.

Sistem transportasi atau alat pengangkutan sebenarnya telah lama dikenal manusia beberapa abad silam, cara yang amat sederhana adalah memakai gerobak yang ditarik dengan kuda atau sapi yang sampai saat ini saja masih dijumpai baik didesa maupun diperkotaan meski dalam skala kecil. Seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, banyak diciptakan penemuan-penemuan baru yang beberapa tahun kemudian menjadi tahap motorisasi. Tahap motorisasi ini ditandai dengan bertambahnya ketergantungan manusia atau masyarakat terhadap kendaraan bermotor seperti bis, minibus, sedan, truk, sepeda motor, dan lain sebagainya.

Kemampuan transportasi atau pengangkutan telah meningkat dengan pesat ditandai dengan semakin berkembang dan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Hal ini menimbulkan persoalan baru yaitu minimnya fasilitas jalan raya yang selanjutnya menuntut adanya pembangunan jalan raya yang diperluas dan dibayar serta dibukanya daerah baru yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh

kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan suatu korelasi kuat dan saling ketergantungan antara satu sama lain, dimana angkutan kendaraan bermotor merupakan sarana sedangkan jalan raya adalah prasarana.

Sejalan dengan adanya sistem motorisasi semakin lama orang jadi berfikir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan raya, maka dilakukanlah pengaspalan jalan, pelebaran dan pembuatan jalan layang dan jalan bebas hambatan, perbaikan jembatan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang membutuhkan dana besar, karena jalan raya merupakan *public goods* yang tidak murni sifatnya, maka pembangunan berhak memungut biaya atas pemakai jalan tersebut, hal ini disebabkan karena jalan raya tersebut memberikan manfaat langsung dan dapat dirasakan oleh pemakai jalan, selain permasalahan diatas masih banyak masalah yang timbul dalam pembiayaan sarana dan prasarana jalan raya yang menyangkut pungutan terhadap pengguna jalan seperti apakah biaya itu seimbang dengan pungutan, jika dilakukan pungutan jalan seperti pajak atas kendaraan bermotor, apakah pungutan pajak telah dilakukan, bagaimana cara pengalokasian yang terbaik agar terjadi keseimbangan antara pajak yang diterima dengan panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor.

Pajak daerah secara garis besar terdiri dari pajak asli daerah dan pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah yang pelaksanaannya didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan daerah dapat berasal dari lima sumber utama, yaitu :

1. PAD ( Pendapatan Asli Daerah )
2. Bagi hasil pajak dan non pajak

3. Sumbangan atau bantuan pembangunan
4. Penerimaan atau bantuan pembangunan
5. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dapat ditambah sebagai sumber perencanaan pemerintah didaerah

PAD adalah penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Laba Perhitungan Daerah ( BUMD )
4. Penerimaan dari Dinas-dinas
5. Penerimaan lain-lain

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan, dan biasanya digunakan oleh orang. Jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bagian pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, hewan, dan manusia.

Kendaraan Bermotor selama ini mempunyai peran yang cukup penting bagi orang sangat dinamis, di zaman yang seperti ini pergerakan manusia sangat tinggi untuk mengejar apa yang ingin dicapai oleh orang tersebut, apabila dilihat dari segi pembangunan daerah maka kendaraan bermotor dapat dipastikan memperoleh dana yang cukup besar dengan melihat acuan apa yang telah dibahas diatas.

Untuk Pajak Kendaraan Bermotor sendiri adalah pajak pusat yang diserahkan pada daerah, karena perkembangan kendaraan bermotor yang sangat

pesat dan peranannya ikut menentukan kemajuan ekonomi dan perkembangan sosial suatu daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan perundangan mengenai wajib pajak bagi pemilik kendaraan bermotor.

Dilihat menurut kondisi jalan, sekitar 36,91% dalam kondisi baik, 20,92% dalam kondisi sedang dan sekitar 42,17% dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi jalan yang rusak dan rusak berat hampir seluruhnya terjadi pada jalan-jalan kabupaten. Semua ini akibat terjadi ketimpangan antara jumlah kendaraan bermotor dengan kondisi jalan yang tidak sesuai karena menurut data yang ada bahwa jumlah kendaraan bermotor di daerah Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ketahun. tabel 1.1. dibawah menunjukkan Jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar menurut jenisnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1.1.**  
**JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR MENURUT**  
**JENISNYA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**2001**

Jenis Kendaraan (1)	Tidak Umum		Umum		Jumlah Total (6)
	Pemerintah (2)	Swasta (3)	Pemerintah (4)	Swasta (5)	
<b>Mobil</b>	3.099	62.246	-	1.974	67.319
	364	19.955	-	740	21.059
<b>Penumpang</b>	1.125	7.246	-	430	8.801
	1.610	35.045	-	804	37.459
	1.260	18.573	-	2.251	22.084
1. Sedan	573	7.277	-	1.241	9.091
2. Jeep	4	22	-	-	26
3. Station Wagon	4	-	-	-	4
<b>Mobil Beban</b>	29	64	-	-	93
	17	2	-	437	456
1. Truck Barang	2	37	-	-	39
2. Truck Container	480	11.154	-	573	12.207
3. Truck Derek	147	17	-	-	164
4. Truck Tank BBM/Air	2	-	-	-	2
5. Truck Pemadam Api	2	-	-	-	2
6. Truck Traktor	331	3.467	-	2.813	6.591
7. Pick Up	80	256	-	1.170	1.506
8. Ambulance	-	175	-	224	399
9. Mobil Jenazah	231	3.036	-	1.419	4.686
10. Lain-lain	4.140	535.337	-	-	539.477
<b>Mobil Bus</b>	-	24	-	-	24
	114	21.752	-	-	21.866
1. Bus Biasa	4.026	513.561	-	-	517.587
2. Bus Casis Panjang					
3. Mini Bus/Micro Bus					
<b>Sepeda Motor</b>					
1. Sepeda Kumbang					
2. Scooter					
3. SPM 50 Keatas					
<b>Jumlah</b>	<b>8.810</b>	<b>619.623</b>	<b>-</b>	<b>7.038</b>	<b>635.471</b>

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari tabel 1.1. kita dapat mengetahui jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2001 tercatat yaitu sebanyak 635.471 unit yang terdiri dari 10,59% mobil penumpang, mobil beban sebanyak

3,48%, 1,04% bus dan 84, 89% atau 539.477 unit sepeda motor (naik 85,62% dari tahun 2000). Dari angka-angka jumlah kendaraan yang terdaftar dapat memberikan peluang yang besar untuk peningkatan PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah Propinsi DIY khususnya penerimaan PKB dan BBNKB adalah merupakan sumber Penerimaan "andalan" dalam mendukung penerimaan PAD. Oleh karena itu pemerintah Propinsi DIY perlu melakukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan dari sector pajak daerah tersebut melalui kebijakan maupun tindakan dalam usaha menunjang peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

Mengenai profil PAD, Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DIY dapat dilihat pada table 1.2. dibawah ini :

**Tabel 1.2.**  
**Realisasi Penerimaan PAD, dan Realisasi**  
**Penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DIY**  
**Tahun anggaran 1997/1998-2001/2002**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi PKB	Realisasi BBNKB
1997/1998	61.617.602.000	22.229.936.790	30.135.171.900
1998/1999	40.594.308.000	23.056.781.595	10.951.740.925
1999/2000	57.877.500.000	29.524.000.000	11.494.247.435
2000	84.225.979.000	34.718.000.000	38.013.275.555
2001	129.415.456.000	46.965.000.000	66.157.656.025
Jumlah	373.730.845.000	156.493.718.385	156.752.091.840

*Sumber : Dipendu dan BPS Propinsi DIY*

Mengingat PKB dan BBNKB sangat diandalkan untuk menunjang PAD Propinsi DIY, maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan dari kedua sumber pajak daerah

tersebut. Diantara kendala yang dihadapi sekarang ini masih banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga yang berdomisili di DIY yang berasal dari luar daerah DIY (Plat Non AB), sehingga tidak dapat dikenakan pungutan PKB dan BBNKB karena pajaknya diterima oleh daerah asal kendaraan bermotor tersebut.

Dilihat dari makin banyak berkembang dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor selama ini, perlu juga dilihat kedalam instansi tersebut berkaitan dengan cara pemungutan pajak, apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut telah berjalan sesuai jalur yang diterapkan agar hasil maupun target dapat dicapai sesuai dengan keinginan dari pemerintah daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan efektifitas pajak/retribusi yaitu realisasi dibagi dengan potensi atau efektifitas berbanding terbalik dengan potensi, bila penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat ditingkatkan, sedangkan potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dirumuskan tidak berubah (konstan), maka efektifitas pajak akan meningkat dan demikian pula halnya dengan PAD juga akan meningkat. Bila terdapat peningkatan dan potensi, maka upaya untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus pula meningkat agar efektifitas tetap tinggi. Hal tersebut memberikan motivasi untuk dilakukan penelitian serta analisis tentang potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Propinsi DIY.

Masalah yang mengemuka adalah seberapa besar tingkat penetapan target dibandingkan dengan potensi yang ada, jadi sebagai batasan awal permasalahan

yaitu menghitung pajak kendaraan bermotor & bea balik nama kendaraan bermotor dan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu masih perlu dirumuskan permasalahan utama penelitian ini yaitu apakah penetapan target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah didasarkan atas potensi yang ada dan apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sudah memenuhi kriteria efisien dan efektif.

Keadaan Geografis wilayah DIY lebih kecil dibanding wilayah lain, sarana perhubungan darat di DIY masih cukup memadai, walaupun masih banyak ditemui beberapa kekurangan seperti mulai seringnya terjadinya kemacetan arus lalu lintas di jalan-jalan pusat kota Yogyakarta pada jam-jam berangkat kerja dan sekolah serta pulang pada siang hari. Hal ini disebabkan tidak seimbang pertambahan kendaraan bermotor dengan pertumbuhan jalan itu sendiri. Dewasa ini keadaan perekonomian di wilayah DIY terus meningkat seiring dengan pertumbuhan PDRB riil akan mencerminkan pertumbuhan output. dalam hal ini menyangkut masalah perekonomian daerah sehingga jika dilihat dalam wujud pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan ekonomi regional, maka wilayah DIY akan terus bertambah yang diimbangi dengan penambahan jumlah kendaraan bermotornya, selain itu Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar yang begitu banyak pelajar yang datang dari berbagai daerah dan tingkat pendidikan yang ada, sehingga potensi untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah semakin meningkat.

Uraian diatas telah memberikan penjelasan secara sederhana tentang arti penting Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,



bahwasannya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi untuk menaikkan PAD, berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat sebuah judul “STUDI PENERIMAAN PEMDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagaimana efisiensi pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap biaya marginal.
3. Bagaimana efektifitas pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mencapai target.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dari berbagai macam-macam pajak yang ada, penulis hanya akan membahas dan menulis dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu bagaimana kontribusi, efisiensi, dan efektifitas dari PKB dan BBNKB tersebut dapat memberikan sebuah nilai bagi PAD, karena keterbatasan kemampuan dan data yang ada maka penulis membatasi hanya dalam kurun waktu 1997 sampai 2001 yang terdapat di Propinsi DIY.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana PKB dan BBNKB memberikan nilai tambah untuk PAD.
2. Untuk menganalisis efisiensi pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga mendapatkan biaya yang rendah.
3. Untuk menganalisis efektifitas pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam mencapai target optimal.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah (instansi terkait)  
Sebagai usulan dalam usaha peningkatan PAD terutama untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selain itu untuk menentukan suatu langkah kebijakan.
2. Bagi Penulis  
Sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini telah didapatkan dibangku kuliah dan sebagai pemahaman sesuai dengan tema penulisan ini.
3. Bagi Universitas  
Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) khususnya di Propinsi DIY.

## BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

### 2.1. Keadaan Wilayah

Propinsi DIY terdiri dari empat (4) satuan fisiografis, yaitu :

- Pegunungan Selatan  
Luas : 1.656,25 km<sup>2</sup>  
Ketinggian : 150-700 m
- Gunung Api Merapi  
Luas : 58,81 km<sup>2</sup>  
Ketinggian : 80-2.911 m
- Daerah rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulon Progo  
Luas : 251,62 km<sup>2</sup>  
Ketinggian : 0-80 m
- Pegunungan Kulon Progo dan Dataran rendah selatan  
Luas : 707,24 km<sup>2</sup>  
Ketinggian : 0-572 m

### 2.2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Propinsi DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> terdiri dari :

- a. Kabupaten Bantul : luas 506,85 km<sup>2</sup>
- b. Kabupaten Gunung Kidul : luas 1.485,36 km<sup>2</sup>
- c. Kabupaten Kulon Progo : luas 586,27 km<sup>2</sup>
- d. Kabupaten Sleman : luas 574,82 km<sup>2</sup>
- e. Kodya Yogyakarta : luas 32,50 km<sup>2</sup>

### 2.3. Kependudukan

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2001, jumlah penduduk DIY tercatat 3.327.954 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,54% dan penduduk laki-laki 49,46%. Menurut kewarganegaraan, persentase penduduk WNI mencapai 99,96% dan selebihnya 0,04% adalah WNA

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2001 adalah 1,00%, relatif konstan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terlihat memiliki angka pertumbuhan diatas angka propinsi, yakni masing-masing 1,43% dan 1,48%. Kondisi ini disebabkan oleh relatif angka migran yang masuk kedalam dua kabupaten/kota tersebut.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di DIY 1.045 jiwa perkm<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 15.414 jiwa perkm<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya 1% dari luas wilayah Propinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki luas wilayah mencapai 46,63% dihuni rata-rata 502 jiwa perkm<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil sensus, komposisi kelompok umur penduduk DIY didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 11,36% dan kelompok umur lansia yaitu umur 60 tahun keatas sebesar 14,71%. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk

**Tabel 2.1.**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY**  
**TAHUN 2000**

Kabupaten/Kota	Tahun 2000		Pertumbuhan Penduduk
	Jumlah	Persentase	
Kulon Progo	370.965	11,88	-0,04
Bantul	781.059	25,02	1,19
Gunung Kidul	670.544	21,48	0,31
Sleman	901.735	28,89	1,51
Yogyakarta	397.398	12,73	-0,38
<b>Propinsi DIY</b>	<b>3.121.701</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>

*Sumber : BPS Propinsi DIY*

Dalam Tabel 2.1. diatas menunjukkan pertumbuhan penduduk yang masih berfluktuasi antar kabupaten, Kabupaten Sleman menempati urutan pertama atau jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 901.735 jiwa diikuti dengan urutan kedua terbesar adalah Kabupaten Bantul sebesar 781.059 jiwa. Dengan demikian total keseluruhan jumlah penduduk Propinsi DIY mencapai 3.121.701 jiwa pada tahun 2000 tidak terlalu menunjukkan kenaikan yang menajam apabila dibandingkan dengan tahun 1990 mencapai angka 2.913.054 jiwa dengan selisih 208.647 jiwa disepuluh tahun tersebut.

#### **2.4. Ketenagakerjaan**

Gambaran tenaga kerja disektor swasta berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mencapai jumlah pendafiar pencari kerja pada tahun 2001 sebanyak 83,582 orang, meningkat sekitar 10,22% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 75.833 orang. Mereka terdiri dari 53% laki-laki dan

47% perempuan. Dari jumlah tersebut 64,77% berpendidikan SLTA, 25,59% Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 8,60% adafah SLTP dan sisanya 1,04% berpendidikan SD. Lowongan pekerjaan yang tersedia adalah 5,90% dari jumlah pencari kerja dan persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah 5,53%.

Berdasarkan hasil sensus 2001, persentase penduduk DIY umur 10 tahun keatas menurut kegiatan adalah 62,99% merupakan angkatan kerja (61,01% bekerja dan 1,98% mencari pekerjaan), sedangkan sisanya sebesar 37,01% merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 20,56%, 11,74%, dan 4,74%). Sedangkan berdasarkan lapangan usaha utama, penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 39,71%, perdagangan 21,38%, jasa 15,09%, industri 12,31% dan sisanya disektor-sektor lainnya. Jumlah pencari kerja dan permintaan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan di Propinsi DIY dapat dilihat dalam tabel 2.2. dibawah ini.

**Tabel 2.2.**  
**JUMLAH PENCARI KERJA DAN PERMINTAAN TENAGA KERJA**  
**MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI PROPINSI DIY**  
**TAHUN 2001**

Tingkat Pendidikan	Terdaftar	
	Laki-laki	Perempuan
SD	145	325
SLTP	1.085	1.625
SLTA	9.637	9.303
DIPLOMA	568	857
SARJANA	2.297	2.645
JUMLAH	13.732	14.755

*Sumber : BPS Propinsi DIY*

## **2.5. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi DIY**

Perekonomian DIY tahun 2001 tumbuh sekitar 2,12%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,01%. Pertumbuhan yang melambat ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada sektor Pertanian yakni -1,27%, padahal pada tahun 2000 sektor ini tumbuh sebesar 10,22%. Selain sektor pertanian, sektor Bangunan juga menunjukkan penurunan, bahkan relatif besar yakni sebesar 12,50%.

Hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi DIY tahun 2001 adalah relatif tingginya pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Angkutan dan Komunikasi, masing-masing sebesar 6,97% dan 10,39%. Sebagai daerah yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan jasa, kondisi masih memperlihatkan masih dinamisnya aktifitas ekonomi. Selain kedua sektor diatas, sektor Industri Pengolahan yang berperan cukup besar dalam perekonomian juga memperlihatkan pertumbuhan positif, sebesar 2,01% setelah tumbuh sebesar -2,69% pada tahun sebelumnya. Meski andil sektor Industri masih lebih kecil dari sektor Pertanian ataupun dari sektor Jasa-jasa, namun sektor Industri tetap merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang potensial karena sifat Industri yang mampu mendorong pembentukan nilai tambah yang tinggi.

**Tabel 2.3.**  
**PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA**  
**BERLAKU DI PROPINSI DIY**  
**TAHUN 2000-2001 ( dalam jutaan )**

Sektor	2000	2001
Pertanian	2.720.872	2.915.337
Pertambangan dan Penggalian	182.616	205.643
Industri Pengolahan	2.127.025	2.400.304
Listrik, Gas dan Air Bersih	99.685	121.077
Bangunan	941.717	1.038.828
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.473.179	2.761.868
Pengangkutan dan Komunikasi	1.248.959	1.508.965
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.084.357	1.216.685
Jasa – jasa	2.215.568	2.584.324
PDRB	13.093.979	14.753.1031

*Sumber : BPS Propinsi DIY*

Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa sektor Pertanian memberi andil terbesar dalam perekonomian DIY, yakni sekitar 19,76% pada tahun 2001. Diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa-jasa masing-masing sebesar 18,72% dan 7,52%. Kemudian sektor Industri Pengolahan memiliki andil 16,27%, sektor Angkutan dan Komunikasi 10,23% serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,25%. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian tercatat memiliki andil terkecil yakni hanya 1,39%.

## 2.6. Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Salah satu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah PAD, dimana potensinya berada didaerah itu dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, PAD Propinsi DIY merupakan sumber pendapatan murni daerah untuk mempercepat kemandirian



daerah dibidang pendanaan, dalam arti kata mampu membiayai rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah Propinsi DIY meningkatkan kemampuannya agar semakin dapat mengusahakan penggalian sumber PADnya terlebih dahulu sesuai dengan keadaan dan potensi perekonomian di daerah masing-masing.

Realisasi Penerimaan Keuangan Daerah di Propinsi DIY tahun 2000 2001 dari PAD naik sebesar Rp 45.189.477, PAD tahun 2000 sebesar Rp 84.225.979 naik menjadi Rp 129.415.456 pada tahun 2001, dari sektor-sektor yang ada didalam PAD Propinsi DIY terdapat Pajak, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Penerimaan dari Dinas-dinas, dan Penerimaan Lain-lain, dari sektor-sektor ini semua terjadi kenaikan, misalnya Pajak pada tahun 2000 sebesar Rp 74.226.339 naik sebesar Rp 42.073.693 menjadi Rp 116.300.032 pada tahun 2001, begitu juga dengan Retribusi Daerah pada tahun 2000 sebesar Rp 2.631.122 menjadi Rp 3.341.769 pada tahun 2001. Pajak Daerah Propinsi DIY dalam pemungutannya telah nampak cara-cara yang efektif begitu juga dengan Retribusi Daerah.

Di Propinsi DIY peningkatan PAD dapat dilihat dari segi Peningkatan Penerimaan Pemerintah Daerah seperti dalam tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**REALISASI PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH**  
**PROPINSI DIY TAHUN 2000-2001**

Uraian	2000	Uraian	2001
Penerimaan Daerah	236.640.552	Penerimaan Daerah	416.910.203
1. Sisa Tahun lalu	23.958.938	1. Sisa Tahun lalu	47.510.550
2. PAD	84.225.979	2. PAD	129.415.456
a. Pajak	74.226.339	a. Pajak	116.300.032
b. Retribusi Daerah	2.631.122	b. Retribusi Daerah	3.341.769
c. Laba BUMD	4.673.831	c. Laba BUMD	4.751.218
d. Penerimaan Lain-lain	2.694.687	d. Penerimaan Lain-lain	5.022.437
3. Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	11.788.563	3. Bagian Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	18.069.268
a. Bagi Hasil Pajak	6.995.895	4. Bagian Sumbangan dan Bantuan	221.914.929
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	4.792.668	a. Sumbangan	110.360.000
4. Bagian Sumbangan dan Bantuan	116.667.072	b. Bantuan	111.554.929
a. Sumbangan	63.538.494	5. Bagian Penerimaan Pembangunan	
b. Bantuan	53.128.578	a. Dari Pemerintah Pusat, dan Daerah Tingkat II	
5. Bagian Penerimaan Pembangunan	0	b. Pinjaman Pemerintah Daerah	
a. Dari pemerintah Pusat, dan Daerah Tingkat II	0	c. Pinjaman Untuk BUMD	
b. Pinjaman Pemerintah Daerah	0		
c. Pinjaman Untuk BUMD	0		

Sumber : BPS Propinsi DIY

## **2.7. Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

### **2.7.1. Visi Pembangunan Daerah**

“Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut, antara lain :

1. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata.
3. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.
4. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya.

5. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan.
6. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah.

### **2.7.2. Misi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan visi Pembangunan serta kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang di dukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi.
2. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan di dukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah.
3. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom yang maju dan di dukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis

dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta di dukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Tujuan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting, dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa.
6. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga yang modern, yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.
7. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan), yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan

pasar lokal, regional dan global, dengan produk agrobisnis dan agroindustri yang kompetitif.

## **2.8. Perkembangan Dua Tahun Terakhir PKB dan BBNKB Di Propinsi DIY**

Data penerimaan PKB sampai dengan 31 Desember dalam tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 34.778.257.525,- dirinci menurut pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 33.462.517.755,- dan Biaya Denda Rp 1.315.739.770,- sedangkan dari bagian BBNKB dibagi dua menjadi BBNKB I (kendaraan bermotor baru dari dealer) dan BBNKB II (kendaraan bermotor bekas) dengan total penerimaan Rp 37.994.275.555,- dirinci dari BBNKB I pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 35.057.427.450,- dan Biaya Denda sebesar Rp 9.960.900,- sedangkan BBNKB II pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 2.868.081.775,- dan Biaya Denda sebesar Rp 58.705.450,- dari segi Tunggakan Pajak totalnya adalah Rp 166.479.210,- sehingga total penerimaan dari PKB dan BBNKB Propinsi DIY sebesar Rp 72.938.012.290,-.

Data penerimaan PKB sampai dengan 31 Desember dalam tahun Anggaran 2001 sebesar Rp 52.674.680.865,- dirinci juga menurut pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 51.163.659.355,- dan Biaya Denda Rp 1.511.012.510,- sedangkan bagian dari BBNKB total penerimaan sebesar Rp 65.556.323.025,- dirinci dari BBNKB I pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 61.933.183.450,- dan Biaya Denda Rp 28.899.650,- sedangkan BBNKB II pengenaan Biaya Pokok sebesar Rp 3.517.834.975,- dan Biaya Denda Rp 76.404.950,- dari segi Tunggakan Pajak totalnya adalah Rp 230.728.540,- sehingga total penerimaan dari PKB dan BBNKB Propinsi DIY sebesar Rp 118.461.732.430,-.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan dari PKB dan BBNKB tahun 2000-2001, hal ini dikarenakan kesadaran dari masyarakat membayar pajak tepat waktu. Dalam anggaran dua tahun tersebut terjadi kenaikan total penerimaan sebesar Rp 45.523.720.140,-

Dari hasil adanya kenaikan penerimaan diatas dikarenakan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sebagai hasil adanya penyuluhan, meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak antara lain lancarnya pengiriman SUPER PKB kepada wajib pajak, cepatnya penyelesaian masalah yang menyangkut keberatan pajak, lebih eratnya kemitraan dengan pengusaha otomotif, adanya peningkatan daya beli masyarakat karena adanya fasilitas kredit dari bank dan keluarnya produk kendaraan bermotor yang bervariasi sehingga menarik minat masyarakat.

## BAB III

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 3.1. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dilakukan oleh Alexander, Pasca Sarjana UGM, 1996.

Berbicara mengenai pajak khususnya, selalu tidak terlepas dari persoalan *freerider*, oleh karena itu dalam pelunasan pajak selalu akan berhadapan dengan Tunggakan maupun Denda dalam hal pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya tingkat (derajat) efektifitas penerimaan PKB sejak tahun 1990-1994 disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1.**

**Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan PKB Propinsi Kalimantan Barat  
1990-1994**

Tahun	Nilai Efektifitas
1990	1,08
1991	0,97
1992	0,90
1993	1,10
1994	1,17
Rata-rata	1,04

Dari pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan PKB di Kalimantan Barat selama periode 1990-1994 rata-rata sebesar 1,04%. Ini berarti rata-



rata dari target yang ditetapkan 104% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain realisasi penerimaan PKB 4% lebih besar dari target.

Efektifitas tertinggi sebesar 117% terjadi pada tahun anggaran 1994, dimana realisasi penerimaan PKB 17% lebih besar dari target, sedangkan pada tahun anggaran 1992 dari target yang ditetapkan hanya 90% yang dapat direalisasikan. Hal ini dapat terjadi antara lain disebabkan pelaksanaan Perda No.1 tahun 1992 tentang tarif baru, pelaksanaannya baru efektif sejak bulan November tahun 1992. Disamping itu adanya kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*) diperkirakan turut mempengaruhi pembelian kendaraan bermotor baru.

Tingkat (derajat) efektifitas penerimaan BBNKB sejak tahun anggaran 1990-1994 disajikan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**  
**Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan BBNKB Propinsi Kalimantan Barat**  
**1990-1994**

Tahun	Nilai Efektifitas
1990	1,40
1991	0,95
1992	0,69
1993	1,25
1994	1,34
Rata-rata	1,13

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan BBNKB di Propinsi Kalimantan Barat selama periode 1990-1994 rata-rata sebesar 1,13%. Ini berarti rata-rata dari target yang ditetapkan 113% dapat direalisasikan oleh

Dipenda atau dengan kata lain rata-rata realisasi penerimaan BBNKB 13% lebih besar dari target setiap tahunnya.

Efektifitas penerimaan tertinggi sebesar 1,40% terjadi pada tahun anggaran 1990 dimana realisasi penerimaan BBNKB sebesar 40% lebih besar dari target, sedangkan pada tahun anggaran 1992 dari target yang ditetapkan hanya 69% yang dapat direalisasikan. Hal ini juga diperkirakan terjadi sebagai dampak dari adanya kebijakan uang ketat (*Tight Money Policy*), yang mencerminkan adanya permintaan dan penawaran kendaraan bermotor baru, sehingga pungutan pada umumnya sebagian besar pada kendaraan bermotor bekas pakai (*second hand*) yang diberi keringanan 50%.

Dari perhitungan proporsi realisasi biaya PKB, selanjutnya dapat ditentukan tingkat derajat efisiensi PKB selama periode 1990-1994 seperti dalam tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**  
**Derajat Efisiensi Pemungutan PKB Propinsi Kalimantan Barat**  
**1990-1994**

Tahun	Nilai Efisiensi
1990	6,37
1991	5,08
1992	5,36
1993	5,81
1994	6,57
Rata-rata	5,84

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi pemungutan PKB di Propinsi Kalimantan Barat selama periode 1990-1994 rata-rata sebesar 5,84%. Nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat menghasilkan

penerimaan PKB sebesar 5,84% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp. 1,- biaya dapat menghasilkan Rp.5,84,- penerimaan PKB.

Hasil yang diperoleh dari pengamatan atas efisiensi pemungutan PKB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1990-1994 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi. Pada tahun 1991 efisiensi Dipenda mengalami penurunan, tetapi kemudian terjadi kenaikan pada tahun 1992 yang ditunjukkan dengan naiknya nilai rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya, dari tahun 1991 (5,00%) menjadi 5,36% pada tahun 1992 dan 5,81% pada tahun 1993 hingga menjadi 6,57% pada tahun 1994. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan PKB di Propinsi Kalimantan Barat adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

Berdasarkan perhitungan proporsi realisasi biaya dan realisasi penerimaan, kemudian ditentukan tingkat derajat efisiensi pemungutan BBNKB selama periode 1990-1994 seperti disajikan dalam tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**  
**Derajat Efisiensi Pemungutan BBNKB Propinsi Kalimantan Barat**  
**1990-1994**

Tahun	Nilai Efisiensi
1990	6,37
1991	5,08
1992	5,36
1993	5,81
1994	6,57
Rata-rata	5,84

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi dalam pemungutan BBNKB di Propinsi Kalimantan Barat selama periode 1990-1994 rata-rata sebesar 5,84%. Nilai ini ternyata relatif sama dengan nilai efisiensi pemungutan PKB. Angka ini kelihatannya menunjukkan indikasi bahwa proporsi hasil capai/realisasi (output) adalah berbanding sama dengan proporsi output PKB terhadap biaya (input) yang dipergunakan, menghasilkan penerimaan BBNKB sebesar 5,48% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp. 1,- biaya dapat menghasilkan Rp.5,84,- penerimaan BBNKB.

Hasil pengamatan atas efisiensi pemungutan BBNKB menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1990-1994 adanya peningkatan efisiensi. Pada tahun 1991 terlihat efisiensi Dipenda mengalami penurunan yakni dari nilai 6,37% pada tahun 1990 menjadi 5,08% pada tahun 1991, tetapi kemudian terjadi kenaikan pada tahun 1992 yang ditunjukkan dengan naiknya nilai rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya dari tahun 1991 (5,08%) menjadi 5,36% pada tahun 1992 dan 5,81% pada tahun 1993 hingga menjadi 6,57% pada tahun 1994. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan BBNKB di Propinsi Kalimantan Barat adalah efisien dari tahun ketahun selama periode pengamatan.

Penelitian mengenai Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Barat telah dilakukan oleh N.Ida Hamidah, Pasca Sarjana UGM, 2000.

Selanjutnya Kontribusi Penerimaan PKB terhadap PAD sejak tahun 1996/1997-2001 disajikan dalam tabel 3.5.

**Tabel 3.5.**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD**  
**Propinsi Jawa Barat Tahun 1996/1997-2001**

Tahun Anggaran	Penerimaan PKB	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1996/1997	162.672.504	542.675.384	29,98
1997/1998	179.814.940	600.590.168	29,94
1998/1999	190.725.214	301.729.436	63,21
1999/2000	236.974.089	455.173.239	52,06
2000	219.271.072	703.008.636	31,19
2001	352.301.961	1.255.596.240	28,66
	Rata-rata		34,40

Kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar 63,21%, kemudian pada tahun anggaran 1999/2000 sebesar 52,06%, Kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD terendah terjadi ditahun anggaran 2001 yaitu sebesar 28,06%.

Kontribusi BBNKB terhadap PAD di Propinsi Jawa Barat sejak tahun anggaran 1996-2001 dapat dilihat dibawah ini dalam tabel 3.6.

**Tabel 3.6.**  
**Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD**  
**Propinsi Jawa Barat Tahun 1996/1997-2001**

Tahun Anggaran	Penerimaan BBNKB	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1996/1997	298.692.504	542.675.384	55,04
1997/1998	309.393.050	600.590.168	51,51
1998/1999	71.178.007	301.729.436	23,59
1999/2000	172.667.327	455.173.239	37,93
2000	426.410.182	703.008.636	60,66
2001	761.495.182	1.255.596.240	60,65
Rata-rata			48,23

Kontribusi BBNKB terhadap PAD yang terbesar terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu terbesar 60,66%, Kontribusi terbesar lainnya terjadi pada tahun anggaran 2001, dimana kontribusi penerimaan BBNKB memberikan 60,65% terhadap PAD. Kontribusi penerimaan BBNKB terhadap PAD yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 yaitu hanya sebesar 23,59%, rendahnya nilai ini dikarenakan dari menurunnya penerimaan BBNKB yang dikarenakan terjadi krisis moneter di tahun 1998.

Penelitian mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur telah dilakukan oleh Yuswanto, Pasca Sarjana UGM, 2000.

Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Propinsi Jawa Timur selama periode 1994/1995-2000 memberikan sumbangan masing-masing yaitu PKB mencapai 38% dan BBNKB mencapai 46% terhadap PAD, sedangkan penerimaan PAD lainnya hanya memberikan sumbangan 16% terhadap PAD. Penerimaan PAD lainnya ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain yang sah.

Selanjutnya Kontribusi PKB dan BBNKB sejak tahun 1994/1995-2000 di Propinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel 3.7.

**Tabel 3.7.**  
**Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD Propinsi Jawa Timur**  
**Tahun 1994/1995-2000**

Tahun Anggaran	PKB (%)	BBNKB (%)
1994	36,44	49,52
1995	33,34	51,88
1996	33,29	51,95
1997	33,41	52,17
1998	49,53	33,38
1999	48,90	35,61
2000	32,69	49,68
Rata-rata	38,23	46,31

Penelitian mengenai Analisis Penerimaan Pemda Propinsi Bali dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dilakukan oleh Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, Pasca Sarjana UGM, 1999.

Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD sejak tahun 1996/1997-2000 dapat dilihat dalam tabel 3.8. dibawah ini :

**Tabel 3.8.**  
**Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD Propinsi Bali**  
**Tahun 1996/1997-2000**

Tahun	PKB	BBNKB
Anggaran	(%)	(%)
1996/1997	31,18	46,30
1997/1998	33,15	46,57
1998/1999	52,44	33,85
1999/2000	47,55	46,64
2000	40,48	52,04
Rata-rata	40,96	45,08

Kontribusi PKB terhadap PAD Propinsi Bali dari tahun 1996/1997-2000, Kontribusi terbesar tahun 1998 sebesar 52,49% dari rata-rata kontribusi selama periode pengamatan sebesar 40,96%, sedangkan BBNKB terhadap PAD pada tahun anggaran 2000 sebesar 52,04% dan terkecil tahun anggaran 1998 hanya sebesar 33,85%.

Selanjutnya tingkat (derajat) efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB sejak tahun 1996/1997-2000 disajikan dalam tabel 3.9. dibawah ini :



**Tabel 3.9**  
**Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan PKB Propinsi Bali**  
**Tahun 1996-2000**

Tahun Anggaran	Nilai Efektifitas	
	PKB	BBNKB
1996/1997	1,032	1,345
1997/1998	1,028	0,989
1998/1999	0,962	0,953
1999/2000	1,270	1,936
2000	1,489	2,625
Rata-rata	1,16	1,56

Dari pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi Bali selama periode pengamatan tahun 1996/1997-2000 rata-rata sebesar 1,16%. Ini berarti rata-rata dari target yang ditetapkan 116% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain realisasi penerimaan PKB 16% lebih besar dari target, sama halnya dengan BBNKB rata-rata sebesar 1,56% atau dengan kata lain realisasi penerimaan BBNKB 56% lebih besar dari target.

Dari perhitungan proporsi realisasi biaya PKB dan BBNKB, selanjutnya dapat ditentukan tingkat derajat efisiensi PKB dan BBNKB selama periode 1996/1997-2000 seperti dalam tabel 3.10.

**Tabel 3.10.**  
**Derajat Efisiensi Pemungutan PKB dan BBNKB Propinsi Bali**  
**Tahun Anggaran 1996/1997-2000**

Tahun Anggaran	Nilai Efisiensi	
	PKB	BBNKB
1996/1997	6,985	6,985
1997/1998	7,129	7,129
1998/1999	7,130	7,130
1999/2000	8,303	8,316
2000	15,020	15,020
Rata-rata	8,913	8,916

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi pemungutan PKB di Propinsi Bali selama periode 1996-2000 rata-rata sebesar 8,91%. Nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat menghasilkan penerimaan PKB sebesar 8,91% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat menghasilkan Rp.8,91,- penerimaan PKB.

Nilai Efisiensi BBNKB ternyata relatif sama dengan nilai efisiensi PKB. Angka ini kelihatan menunjukkan indikasi bahwa proporsi hasil capai/realisasi (output) adalah berbanding sama dengan proporsi output PKB terhadap biaya (input) yang dipergunakan, menghasilkan penerimaan BBNKB sebesar 8,91% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya dapat menghasilkan Rp.8,91,- penerimaan BBNKB.

### 3.2. Landasan Teori

#### 3.2.1. Pengertian Pajak

- a. Menurut Prof.Dr.Rochmat Socmitro.SII.

Pajak adalah “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

- b. Dr.Soeparman Soemahamidjaja.

Pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

- c. Menurut Prof S.I.Djajadiningrat.

Pajak adalah “suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

### 3.2.2. Pengelompokan Pajak

Menurut Golongannya :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan, Pajak Cukai, Bea Masuk, Bea Materai.

Menurut Sifatnya :

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

Menurut Wewenang Pungutan :

- a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri

atas Pajak Daerah Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kodya terdiri dari Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

Sumber Pajak Daerah yang berpotensi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan pajak akan meningkat pula dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah Propinsi DIY. Namun perlu diperhatikan dampak negatif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di jalan yaitu adanya polusi udara dan kecelakaan lalu lintas.

### **3.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **3.3.1. Pengertian PKB**

PKB merupakan pungutan daerah atas kepemilikan kendaraan bermotor untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pengertian ini berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan pungutan PKB, PKB merupakan Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemda Tingkat I membuat peraturan – peraturan sendiri untuk mengatur PKB didaerahnya.

Menurut sifatnya PKB merupakan Pajak Obyektif, yaitu pajak yang pungutannya berpangkal pada obyeknya dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya atau bersifat kebendaan.

### **3.3.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak**

Dasar hukum yang mendasari diberlakukannya Ordonansi PKB adalah Staatsblad 1934 No.718 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1935 No. 531, Staatsblad No. 1939 No. 630, Staatsblad 1940 No. 226, Staatsblad 1949 No. 376, Peraturan Pengganti UU (Perpu) 1959 No.8 lembaran negara 1959 No.101.

Pertama kali jenis pajak untuk Kendaraan Bermotor lahir adalah pada saat diadakannya Pajak Rumah Tangga 1908. Ada 4 dasar diantaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil.

### **3.3.3. Subyek Pajak dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **3.3.3.1. Subyek PKB**

Dalam PKB subyek pajak disebut dengan wajib pajak yaitu orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan berdomisili didaerah, wajib pajak inilah yang bertanggung jawab atau kewajiban pembayaran pajak terutang.

#### **3.3.3.2. Obyek PKB**

Obyek PKB adalah sasaran pengenaan pajak atau apa yang dikenakan pajak, Obyek pajak pada kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang ada didaerah lebih dari 90 hari berturut-turut, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan

Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu yang biasanya untuk angkutan orang atau alat-alat berat yang digunakan didarat dan digerakkan oleh motor dan bahan bakar bensin, gas, atau bahan bakar lainnya tidak termasuk berjalan di atas rel. Untuk tarif yang dikenakan PKB adalah tarif tetap dan tidak tergantung oleh nilai obyek.

#### **3.3.4. Obyek Pajak yang dikecualikan dari PKB**

- a. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa tidak termasuk dibebankan adalah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh BUMN, BUMD dan Kendaraan-kendaraan yang dikomersilkan.
- b. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, perwakilan PBB serta badan-badan khusus, badan atau organisasi internasional dan tenaga asing yang diperbantukan kepada pemerintah Republik Indonesia.
- c. Ambulan, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran.
- d. Kendaraan bermotor yang disita atau disegel pemerintah.
- e. Kendaraan bermotor yang berada ditangan pabrik atau pedagang kendaraan bermotor dan semata-mata untuk dijual atau dipamerkan.

### **3.3.5. Dasar dan Perhitungan Tarif PKB**

Untuk menghitung tarif pajak yang terhutang, tarifnya berdasarkan jenis, fungsi, isi silinder (cc), tahun pembuatan dan nilai kendaraan bermotor. Untuk menetapkan besarnya tarif pajak berdasarkan peraturan daerah, sesuai pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri, untuk pemilikan kendaraan bermotor jenis penumpang (sedan, jenis minibus), perorangan yang kepemilikannya lebih dari satu dikenakan tarif pajak progresif sebesar :

- a. Pemilikan kendaraan kedua dikenakan 120% dari tarif pajak
- b. Pemilikan kendaraan ketiga dikenakan 140% dari tarif pajak.
- c. Pemilikan kendaraan keempat dan seterusnya dikenakan 150% dari tarif pajak.

### **3.3.6. Saat Pendaftaran dan Pembayaran PKB**

Kewajiban mendaftarkan pajak yang terhutang bagi kendaraan bermotor baru adalah 14 hari setelah/syah tanggal penyerahan dalam hak milik sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak. Bagi kendaraan bermotor yang pindah keluar daerah/mutasi 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah. Bila kewajiban memasukkan SPT (Surat Pemberitahuan) tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan denda sebesar 25% dari pokok pajak.

Kewajiban pembayaran pajak yang terhutang pada saat mendaftarkan atau selambat-lambatnya pada jatuh tempo ( pada tanggal, bulan dan tahun yang tertulis setiap tahunnya). Pembayaran dilakukan dikas daerah atau pembayaran yang



tercantum dalam nota pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau STP (Surat Tagihan Pajak). Kepada wajib pajak yang telah melunasi PKB (setahun kedepan) diberikan peneng pajak sebagai tanda lunas pajak.

### **3.3.7. Denda dan Penagihan Pajak**

Keterlambatan pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam nota pajak, SKP yang telah melewati jatuh tempo dikenakan denda sebesar 5% sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan selama lamanya 12 bulan.

Jumlah dan denda pajak yang tercatat dalam nota pajak SKP dapat ditagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1. Keberatan dan Banding**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur atas ketetapan pajak paling lambat 90 hari setelah nota pajak STP diterima. Pengajuan keberatan tidak menanggihkan pembayaran PKB yang telah ditetapkan. Gubernur berwenang menolak atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan diatas.

#### **2. Ketentuan Pidana**

Wajib pajak yang mengisi STP yang tidak jelas, tidak benar dan tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian Pemda diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

### **3.3.8. Kelengkapan Dokumen untuk Pendaftaran PKB**

#### **3.3.8.1. Persyaratan untuk semua jenis kendaraan**

Untuk semua jenis pendaftaran diperlukan identitas yang jelas bagi pemilik/pemegang kendaraan bermotor, adalah :

a. Untuk perorangan

KTP asli, Sim asli, KK atau surat keterangan identitas sah lainnya ditambah dua (2) lembar fotokopi

b. Untuk Badan Hukum

- Salinan pendirian ditambah dua lembar fotokopi
- Keterangan domisili
- Surat Kuasa bermaterai cukup (Rp 6000) dan ditandatangani oleh pemimpin serta diberi cap

c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas (surat kuasa yang bermaterai cukup dari instansi yang bersangkutan).

#### **3.3.8.2. Persyaratan Berdasarkan Jenis Pendaftaran**

Adapun persyaratan berdasar jenis pendaftaran adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran kendaraan bermotor baru.

- Faktur
- PPUD/CKD (khusus roda empat)
- Cek fisik kendaraan

e. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah/Mutasi dari Luar Daerah

- KTP/SIM/KK
- Surat keterangan pengganti STNK dan BPKB
- Surat keterangan fiskal antar daerah
- Cek fisik kendaraan dan Kuitansi jual beli

### **3.4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

#### **3.4.1. Tujuan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan dari pembayaran BBNKB II, III, dan seterusnya, ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dalam membayar BBNKB I, II, III, dan seterusnya, pemilik kendaraan bermotor harus membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- a. BBNKB itu sendiri.
- b. Biaya formulir BBNKB.
- c. Biaya pengolahan data elektronik (komputer).
- d. Biaya administrasi pembuatan BPKB.

Biaya – biaya diatas, seperti BBNKB itu sendiri, biaya formulir BBNKB, dan biaya pengolahan data elektronik merupakan penerimaan pemerintah daerah setempat. Sedangkan biaya administrasi pembuatan BPKB merupakan penerimaan

Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kodak daerah setempat. Biaya ini diadakan berdasarkan Perintah Kepala Kepolisian RI No. Pol : Print/01/III/1976.

### **3.4.2. Fungsi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB )**

Pada mulanya Direktorat Lalu Lintas Jalan (D.L.L.J) mengeluarkan Surat Hak Milik Kendaraan Bermotor (SHMKB) yang berlaku hanya untuk P.Jawa saja. Akan tetapi SHMKB ini dalam pelaksanaannya dianggap kurang efektif. Sehingga Sejak tanggal 17 April 1967, berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Lalu Lintas/Polri No.001/I/4 dan No.2/3/25/Lantas/67, SHMKB dihapuskan.

Sejak tanggal 2 Januari 1968, berlakulah apa yang dinamakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dasar hukum diberlakukannya BPKB adalah SKEP Pangak No.Pol.5/SM/PANGAK/1968, tanggal 2 Januari 1968 jo Instruksi Menhankam/Pangab No.SNK/1045/VIII/1972, tanggal 2 April 1972.

Dalam uraian selanjutnya, bahwa BPKB bukanlah sebagai pengganti SHMKB, melainkan adalah suatu penyempurnaan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari Kepolisian, sekaligus mempermudah tindakan represif, bila dianggap perlu, mengingat ada peningkatan gangguan keamanan dijalan-jalan berupa pencurian dan perampokan kendaraan bermotor.

BPKB juga dimanfaatkan untuk penyempurnaan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan daerah, seperti pembayaran BBNKB dan PKB. Jika

pembayaran BPKB I sudah dibayar (dipungut dari kendaraan bermotor yang besarnya ditetapkan sebesar 10% dari harga faktur kendaraan bermotor) dan kemudian kendaraan tersebut diperjualbelikan (menjadi *use car*), si pembeli harusnya membayar BBNKB II (dan biasanya dalam transaksi berikutnya harus membayar BBNKB III, dan seterusnya). Besarnya BBNKB II, III, dan seterusnya, ditetapkan sebesar 5% dari harga jual yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan.

### **3.4.3. Obyek BBNKB**

Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Dalam pengertian tersebut, pajak tidak dikenakan pada setiap penyerahan yang bukan hak milik. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa dan pinjam meminjam.

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan penyerahan adalah penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau dapat pula perbuatan sepihak. Perlu ditambahkan, bahwa dalam hal penyerahan terkandung makna penguasaan. Karena itu, perlu ditegaskan arti penguasaan, yakni penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 1 tahun dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Ini juga dimaksudkan untuk menghindari penyelundupan BBNKB yang dilakukan seseorang atau suatu badan. Saat lampaunya adalah dalam waktu satu tahun dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika

penguasaan itu sebagai akibat jabatan. Misalnya, seorang pegawai perusahaan yang menggunakan kendaraan bermotor milik perusahaan tersebut.

#### **3.4.4. Pembebasan BBNKB**

Dalam Undang-undang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1959, setiap penyerahan kendaraan bermotor dibawah ini dapat dibebaskan dari BBNKB, yaitu :

- a. 1. Sepeda Kumbang
2. Semua kendaraan bermotor yang dimasukkan sendiri dari luar negeri atau dibeli langsung dari importir.  
Pembebasan tersebut dimaksudkan sebagai pembebasan mengenai obyeknya.
- b. 1. Penyerahan kendaraan bermotor pada pemerintah pusat dan daerah-daerah otonom.
2. Penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil diplomatik, konsuler, dan wakil dari negara asing.
3. Penyerahan kendaraan bermotor kepada wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pembebasan diatas (b) dimaksudkan sebagai pembebasan pajak kepada subyek pajak, dalam hal ini orang atau badan yang menerima penyerahan. Misalnya, negara atau daerah dengan alasan bahwa badan pemerintah mengadakan pembelian tidak untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk kepentingan bersama atau

kepentingan negara dan tidak pula sewajarnya negara membayar pajaknya kepada dirinya sendiri.

Pembebasan terhadap wakil diplomatik dan badan-badan internasional didasarkan kepada kebiasaan yang berlaku dalam bidang hukum internasional, dan berdasarkan pula pada peraturan mengenai kekebalan hukum (asas resiprositas).

Pemegang kendaraan bermotor akan diberikan pengurangan pajak atau pembebasan pajak apabila :

- a. Kendaraan bermotor tersebut hancur
- b. Kendaraan bermotor itu tidak dapat dipergunakan lagi
- c. Kendaraan bermotor itu tidak termasuk dalam ordonansi
- d. Kendaraan bermotor itu pindah keluar Indonesia untuk selama lamanya

Dalam hal pemindahan tangan pemilik kendaraan, maka pemilik kendaraan yang lama dapat melepaskan haknya secara tertulis di kantor pejabat yang ditunjuk, dengan maksud kepada siapa kendaraan itu dipindahkan. Dalam hal kendaraan tidak digunakan lagi, maka kendaraan itu harus disegel sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipakai lagi.

#### **3.4.5. Dasar Perhitungan**

Menurut Peraturan Daerah No. 17 tahun 1991, dasar untuk menghitung BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Apabila terjadi perubahan bentuk setiap kendaraan bermotor yang mengakibatkan kenaikan jual kendaraan bermotor yang bersangkutan, maka dipungut tambahan BBNKB 10% dari selisih nilai jual sebelum dan sesudah perubahan. Demikian pula dengan terjadi penggantian mesin kendaraan bermotor yang dipungut tambahan 10% dari harga mesin pengganti. Dalam hal-hal tertentu bisa saja wajib pajak merasa keberatan dengan nilai jual yang dipakai sebagai dasar pengenaan BBNKB. Oleh karena itu, wajib pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Taksasi yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

#### **3.4.6. Tarif**

Besarnya tarif BBNKB dapat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 10% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku
- b. Untuk penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 5% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku
- c. Untuk penyerahan kendaraan bermotor eks CC/CD dari badan internasional kepada badan penyalur adalah 10% dari *cost insurance freight* ( CIF ).



### **3.4.7. Surat Pemberitahuan**

Menurut Undang-undang BBNKB 1959, Surat Pemberitahuan harus memuat tentang :

- a. Nama dan alamat lengkap, baik dari yang menyerahkan maupun dari yang menerima penyerahan kendaraan
- b. Tanggal penyerahan
- c. Jenis, merk dan tahun pembuatan kendaraan
- d. Dasar atas mana penyerahan dilakukan
- e. Harga penjualan dan atau nilai penjualan

Atas pemberitahuan itu, Inspeksi Keuangan akan mengeluarkan Surat Kuasa menyettor yang memuat hal sebagai berikut :

- a. Nama orang yang menerima penyerahan
- b. Nama, merk dan tahun pembuatan kendaraan
- c. Jumlah bea, tambahan yang harus dibayar
- d. Saat mana pembayaran selambat-lambatnya harus dilakukan

Pembayaran BBNKB tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan terhitung dari tanggal Surat Kuasa untuk menyettor tersebut. Jika tidak, akan dikenakan denda sebesar jumlah denda yang terutang, kecuali jika wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pelayanan Pajak untuk memundurkan waktunya, dimana surat permohonan itu harus diajukan sebelum jangka waktu itu lampau, dengan alasan yang dapat dibenarkan.

#### **3.4.8. Tata Cara Pembayaran**

Pembayaran BBNKB dapat dilakukan di Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk setelah nota pajak atau SKP diterbitkan. Apabila BBNKB tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah diterbitkannya nota pajak dan atau SKP, maka wajib pajak dikenakan denda sebesar 100% dari pajak terutang. Jika SKP telah diterbitkan dan BBNKB tidak juga dilunasi setelah waktu yang ditetapkan (30 hari), maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), dimana pajak yang terutang berdasarkan STP itu harus dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak STP diterima wajib pajak. Jumlah pajak yang tercantum dalam nota pajak (*notice*), SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa (SP).

#### **3.4.9. Keberatan**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atas tambahan dan denda BBNKB sebagaimana dimaksud pada Surat Pemberitahuan. Pengajuan keberatan tersebut selambat-lambatnya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak nota pajak (*notice*) atau SKP atau STP diterima. Pengajuan surat keberatan itu tidak menunda pembayaran BBNKB beserta tambahan atau denda yang telah ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Kepala Daerah mengenai keberatan terhadap tambahan dan atau denda BBNKB, keberatan dimaksud dianggap diterima.

## **BAB IV**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **4.1. Metode Kuantitatif**

Metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang dapat dinyatakan dengan jelas atau menggunakan formula yang pasti untuk mengetahui sampai dimana pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai efisien dan efektif.

#### **4.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data tahunan ini antara lain "DIY Dalam Angka" yang diterbitkan oleh BPS bekerja sama dengan Bappeda Propinsi DIY dari beberapa tahun dimulai dari tahun 1997-2001, Data-data dari Kantor Samsat, Dipenda, dan Biro Keuangan DIY, dalam beberapa tahun dimulai dari tahun 1997-2001.

#### **4.3. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, maka sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai Kontribusi, Efisiensi, dan Efektifitas PKB dan

BBNKB di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pembahasan bentuk formula dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD.

Dalam hal ini melihat berapa besarnya Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap total pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan agar diketahui sampai sejauh mana PKB dan BBNKB dapat memberikan nilai tambah bagi besarnya penerimaan pendapatan asli daerah, Perhitungan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus yang disebutkan dibawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PKB \& BBNKB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Pengaruh kenaikan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD adalah bila kontribusinya semakin tinggi, maka akan semakin baik bagi PAD karena akan mendorong peningkatan PAD dari sektor lainnya. Bila yang terjadi adalah yang sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha meningkatkan pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Daya Guna (Efisiensi) pemungutan PKB dan BBNKB.

Efisiensi adalah mengukur bagian dari hasil PKB dan BBNKB yang digunakan untuk menutup biaya (biaya marginal) memungut pajak yang bersangkutan. Efisiensi akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan

dapat ditekan serendah mungkin. Efisiensi ( Jones & Pendlebury ) 1996 hal.9

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}}$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Hasil Perolehan (Realisasi)}}{\text{Biaya Pemungutan}}$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{RPKB \& BBNKB + PRT + PRD}{PRB(PKB \& BBNKB + T + D)}$$

- RPKB & BBNKB = Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- PRT = Proporsi Realisasi Tunggalan
- PRD = Proporsi Realisasi Denda
- PRB = Proporsi Realisasi Biaya
- T = Tunggalan
- D = Denda

Untuk mendekati biaya, digunakan formula :

$$PRB = \frac{RP(PKB \& BBNKB + T + D)}{RPPD + RRD} \times RBDp$$

- RPPD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
- RRD = Realisasi Retribusi Daerah
- RBD p = Realisasi Belanja Dipenda

### 3. Hasil Guna (Efektifitas).

Secara konsep, Efektifitas adalah merupakan suatu ukuran yang menunjukkan suatu keberhasilan atau ketepatan dalam pencapaian suatu sasaran. Oleh karena itu efektifitas berkaitan hanya dengan output (target) dan yang lebih penting adalah bahwa derajat dari efektifitas sama sekali bukan tentang berapa banyak yang dihasilkan untuk mencapai sasaran atau target (output) tersebut, Efektifitas (Devas Dkk) 1989 hal.143 diukur sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Formulasi tersebut mengukur hubungan antara hasil PKB dan BBNKB terhadap potensi PKB dan BBNKB.

Formulasi dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PKB \& BBNKB}}{\text{Potensi PKB \& BBNKB}}$$

Dalam hal penerimaan, pencapaian suatu target/sasaran dapat diukur dengan suatu besaran yang menunjukkan hubungan antara hasil capai PKB dan BBNKB (realisasi) terhadap potensi PKB dan BBNKB, karena kendaraan bermotor adalah tergolong harta yang bergerak, sehingga sulit untuk menentukan besarnya potensi PKB dan BBNKB yang sebenarnya, mengingat

sulitnya menentukan besar potensi PKB dan BBNKB, maka digunakan target penerimaan PKB dan BBNKB.

Sebagai pendekatan dari potensi tersebut digunakan formulasi :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasiPKB \& BBNKB} + T + D}{\text{TargetPKB \& BBNKB} + T + D}$$

Proporsi Target Tunggakan PKB dan BBNKB :

$$\frac{\text{TargetPKB \& BBNKB}}{\text{TotalTargetPajakDaerah}} \times \text{TargetTunggakanPajak}$$

Proporsi Target Denda PKB dan BBNKB :

$$\frac{\text{TargetPKB \& BBNKB}}{\text{TotalTargetPajakDaerah}} \times \text{TargetDendaPajak}$$

Proporsi Realisasi Tunggakan PKB dan BBNKB :

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPKB \& BBNKB}}{\text{TotalPenerimaanPajakDaerah}} \times \text{RealisasiTunggakanPajak}$$

Proporsi Realisasi Denda PKB dan BBNKB :

$$\frac{\text{RealisasiPenerimaanPKB \& BBNKB}}{\text{TotalPenerimaanPajakDaerah}} \times \text{RealisasiDendaPajak}$$

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA**

#### **5.1. Kontribusi PKB dan BBNKB Terhadap PAD**

Kendaraan Bermotor berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah aktifitas manusia dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan di zaman sekarang ini, peranan kendaraan bermotor sendiri selama ini cukup penting bagi orang yang sangat dinamis, sehingga apabila dilihat dari segi pembangunan daerah maka kendaraan bermotor dapat dipastikan memperoleh dana yang cukup besar dengan melihat kenyataan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DIY yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Kendaraan Bermotor tidak terlepas dari bea balik nama, BBNKB dari kendaraan bermotor baru (BBNKB I) dan kendaraan bermotor bekas (BBNKB II) besarnya masih didominasi oleh kendaraan bermotor baru, BBNKB I mengambil peranan sangat besar dikarenakan dari sistem kredit yang mudah bagi masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor baru, misalnya adalah Uang Muka dan Bunga yang rendah dan Angsuran bisa sampai empat tahun.

Untuk melihat seberapa besar peranan PKB dan BBNKB terhadap PAD menggunakan formula kontribusi yang merupakan rasio antara jumlah penerimaan PKB dan BBNKB dengan kontribusi asli daerah dikalikan 100%. Besarnya kontribusi PKB dan BBNKB untuk tahun anggaran 1997/1998 sampai 2001 dapat dilihat pada tabel 5.1. dan tabel 5.2. di bawah ini :



**Tabel 5.1.**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Propinsi DIY**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001**

Tahun Anggaran	Penerimaan PKB	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1997 / 1998	22.229.936.790	61.617.602.000	36,07
1998 / 1999	23.056.781.595	40.594.308.000	56,79
1999 / 2000	29.524.000.000	57.877.500.000	51,01
2000	34.718.000.000	84.225.979.000	41,22
2001	46.965.000.000	129.415.456.000	36,29
<b>Jumlah</b>	<b>156.493.718.385</b>	<b>373.730.845.000</b>	<b>44,27</b>

*Sumber : Diolah dari data Dipenda dan BPS DIY*

Dari tabel 5.1. diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap total penerimaan PAD. kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 1998/1999, yaitu sebesar 56,79% dari total penerimaan PAD, Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 1997/1998, yaitu sebesar 36,07%. Secara rata-rata selama kurun waktu 1997/1998 - 2001 kontribusi PKB terhadap total penerimaan PAD yaitu 44,27%.

**Tabel 5.2.**  
**Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Propinsi DIY**  
**Tahun Anggaran 1997/1998 – 2001**

Tahun Anggaran	Penerimaan BBNKB	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1997 / 1998	30.135.171.900	61.617.602.000	48,90
1998 / 1999	10.951.740.925	40.594.308.000	26,97
1999 / 2000	11.494.247.435	57.877.500.000	19,85
2000	38.013.275.555	84.225.979.000	45,13
2001	66.157.656.025	129.415.456.000	51,12
<b>Jumlah</b>	<b>156.752.091.840</b>	<b>373.730.845.000</b>	<b>38,39</b>

*Sumber : Diolah dari data Dipenda dan BPS DIY*

Dari tabel 5.2. diatas dapat dilihat besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap total penerimaan PAD. kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2001, yaitu sebesar 51,12% dari total penerimaan PAD, Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun anggaran 1999/2000, yaitu sebesar 19,85%. Secara rata-rata selama kurun waktu 1997/1998 - 2001/2002 kontribusi BBNKB terhadap total penerimaan PAD yaitu 38,39%.

Kontribusi PKB dan BBNKB diatas sangat berfluktuasi dari tahun ketahun, didalam kontribusi PKB peningkatan terjadi hanya dari tahun anggaran 1997 sampai 1998 sebesar 20,72% yang diakibatkan pada tahun anggaran tersebut terjadi krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia, bukan berarti kenaikan tersebut karena pendapatan masyarakat meningkat, tetapi dilihat dari sektor penerimaan PAD yang menurun dan penerimaan PKB meningkat dan memberikan kontribusi cukup besar, pada tahun anggaran 1999 sampai 2001 kontribusi mengalami penurunan dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan baru dan berdampak pada sektor penerimaan BBNKB yang terus menerus meningkat hingga tahun anggaran 2001.

Masyarakat dapat melihat peluang tentang kendaraan bermotor baru di Indonesia yang harganya masih terjangkau oleh kalangan rendah, kendaran bermotor import dari Negara Cina dan Korea tersebut membuat masyarakat tidak lagi melihat dari segi kualitas namun hanya dilihat dari segi harga yaitu murah dan terjangkau dibandingkan dengan produk kendaraan dari Negara Jepang yang berkualitas tinggi namun dengan tingkat harga yang juga tinggi.

**TABEL 5.3.**  
**BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 1997-2001**

Uraian	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000	2001
Pos Pajak Daerah	52.544.911,875	34.136.041,095	49.468.950,738,70	74.226.339,320,54	123.516.267,076,36
1. PKB	22.229.936,790	23.056.781,595	29.665.665,070	35.001.149,485	56.045.202,910
2. BBNKB	30.135.171,900	10.951.740,925	18.862.948,260	37.936.862,705	66.157.656,125
3. PBBKB	-	-	940.337,408,70	1.288.327,130,54	1.313.408,041,36
Pos Retribusi Daerah	3.192.736,700	1.225.947,609	2.419.490,586,25	2.631.121,611,50	3.964.474,901
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	2.636.404,679,81	3.288.688,489,30	4.845.606,036,73	4.673.831,499,38	4.385.830,635,47
Pos Penerimaan dari Dinas-dinas	766.188,340,50	786.740,420,80	-	-	-
Pos Lain-lain PAD yang sah	979.284,433,25	1.156.891,040,20	1.143.452,407,13	2.694.686,451,85	10.418.319,371,38

Sumber : *Nota Keuangan Propinsi DIY*

Kecendrungan kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD hingga mencapai lebih dari 80% selama periode pengamatan dikarenakan bahwa memang Propinsi DIY dipenuhi atau didominasi kendaraan bermotor, terlebih khusus adalah sepeda motor, sepeda motor inilah merupakan alat yang sederhana digunakan oleh pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kota pelajar ini, walaupun masih banyak plat Non AB tetapi masih didominasi oleh plat AB.

Untuk melihat data-data penunjang yang menyatakan bahwa PKB dan BBNKB berperan sangat dominan dibanding penerimaan-penerimaan lainnya terdapat ditabel 5.3, Hal lain yang perlu dikaji adalah bahwa penerimaan dari PAD Propinsi DIY lainnya kurang berpotensi dibanding PKB dan BBNKB, misalnya adalah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), penerimaan lain adalah Retribusi, Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari semua hal-hal penerimaan tersebut diatas adalah merupakan wewenang dari Propinsi DIY, apabila ada penerimaan-penerimaan lain selain diatas maka telah melanggar hukum atau UU yang berlaku.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Propinsi antara lain Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, dan Propinsi Bali dapat dilihat dibawah ini:

## 1. Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat dalam nilai Kontribusi PKB selama 6 tahun dari tahun 1996/1997-2001 mencapai 34,40% dan dari sektor BBNKB mencapai 48,23%, hal ini berbanding terbalik dengan Propinsi DIY dimana Kontribusi PKB mencapai 44,27% dan BBNKB 38,39%, ini dikarenakan bahwasannya Propinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang cukup besar dan berpenduduk yang besar pula. Dilihat dari tahun 1998/1999-2001 selepas krisis moneter nilainya menaik sangat signifikan, berbanding terbalik dengan sektor PKB yang nilainya menurun. Sektor BBNKB lebih besar nilainya dibanding dengan Propinsi DIY memang dilihat dari nilai pertahunnya mencapai angka diatas 50% sedangkan BBNKB di Propinsi DIY masih dibawah 50%.

## 2. Propinsi Jawa Timur

Propinsi Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan Propinsi Jawa Barat. Propinsi Jawa Timur dalam nilai Kontribusi PKB selama 7 tahun dari tahun 1994/1995-2000 mencapai 38,23% dan sektor BBNKB mencapai 46,31%, hal ini juga berbanding terbalik dengan Propinsi DIY, Dilihat dari tahun 1998/1999-2000 selepas krisis moneter nilai beranjak naik namun tidak setinggi nilai Propinsi Jawa Barat, sektor PKB juga terlihat menurun signifikan, masa sebelum krisis yaitu tahun 1994/1995-1997/1998 nilai dari BBNKB mencapai diatas 50% bahwasannya memang di Propinsi Jawa Timur tingkat daya beli masyarakat sangat tinggi berbeda dengan Propinsi DIY yang mayoritas hanya ditempati oleh masyarakat pendatang dan bertujuan hanya menuntut ilmu.

### 3. Propinsi Bali

Propinsi Bali memberikan Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD mencapai 85%, terlihat bahwa PKB dan BBNKB berbanding sama, apabila nilai secara rata-rata dibanding dengan Propinsi DIY tidak jauh berbeda yaitu sebesar 85% terhadap PAD. Hal yang sama juga menunjukkan Propinsi Bali dengan Propinsi DIY adalah wilayah dan penduduk yang tidak terlalu besar.

Data perbandingan Kontribusi PKB dan BBNKB Propinsi lain khususnya Pulau Jawa dan Pulau Bali selain Propinsi Jawa Tengah dikarenakan memang adanya keterbatasan data yang diperoleh.

### 5.2. Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berbicara mengenai pajak khususnya, selalu tidak terlepas dari persoalan *freerider*, oleh karena itu dalam pelunasan pajak selalu akan berhadapan dengan Tunggakan maupun Denda dalam hal PKB.

Pembahasan mengenai efektifitas juga tidak terlepas dengan target penerimaan, sampai sejauh mana tingkatan target itu dapat direalisasikan oleh Dipenda dengan melihat banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DIY, Tabel 5.4. di bawah ini adalah perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 1997 sampai 2001.

**Tabel 5.4.**  
**Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Propinsi DIY**  
**Tahun 1997-2001**

Jenis Kendaraan	1997	1998	1999	2000	2001
Sedan	17.150	17.810	18.601	19.996	21.059
Station Wagon	30.235	32.036	33.014	36.407	37.459
Jeep	7.169	7.372	7.552	7.924	8.801
Bus	5.856	5.540	5.687	5.751	6.591
Truk	8.492	8.560	8.487	8.960	9.709
Ambulan	339	333	270	496	164
Pick Up	15.670	16.103	16.158	160.111	12.207
Sepeda Motor	405.778	420.587	449.637	290.633	539.477
Jumlah	490.689	508.341	539.406	530.278	635.467

*Sumber : BPS Propinsi DIY*

Dibawah ini terdapat hasil yang menunjukkan tingkat (derajat) efektifitas penerimaan PKB sejak tahun anggaran 1997/1998-2001

**Tabel 5.5.**  
**Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan PKB Propinsi DIY**  
**Tahun 1997/1998 – 2001**

Tahun	Nilai Efektifitas
1997 / 1998	1,06
1998 / 1999	1,01
1999 / 2000	1,13
2000	1,08
2001	1,03
Rata-rata	1,06

*Sumber : Diolah dari data Dipenda DIY*

Dari pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan PKB di Propinsi DIY selama periode tahun anggaran 1997-2001 rata-rata sebesar 1,06%. Ini berarti rata-rata dari target yang ditetapkan 106% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain realisasi penerimaan PKB 6% lebih besar dari target.

Selama periode pengamatan menunjukkan pemungutan dari PKB dilihat dari tingkat efektifitas secara keseluruhan telah mencapai target, kondisi pencapaian target ini karena banyaknya jumlah kendaraan baik dari kendaraan bekas (*second hand*) maupun kendaraan baru, walaupun ada perubahan tariff PKB dari 5% (Undang-undang No.34 Tahun 2000) menjadi 1,5% (Undang-undang No.65 Tahun 2001) namun masyarakat melihat tarif tersebut masih terjangkau, sedangkan tariff dari BBNKB tetap yaitu sebesar 10%, hal-hal lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan adalah pemberitahuan masa pajak kepada Wajib Pajak melalui pengiriman Surat Pemberitahuan (Super) PKB, Penyuluhan/sosialisasi PKB dan BBNKB secara rutin dan berkesinambungan kesetiap kecamatan dan kelurahan, penagihan dari rumah kerumah oleh PPNS, dan cepatnya penyelesaian masalah yang menyangkut keberatan pajak.

### **5.3. Efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Tingkat (derajat) efektifitas penerimaan BBNKB sejak tahun anggaran 1997/1998-2001 disajikan tabel 5.6. dibawah ini :



**Tabel 5.6.**  
**Tingkat Efektifitas Realisasi Penerimaan BBNKB Propinsi DIY**  
**Tahun 1997/1998-2001**

Tahun	Nilai Efektifitas
1997 / 1998	1,08
1998 / 1999	1,09
1999 / 2000	1,12
2000	1,16
2001	1,06
Rata-rata	1,10

*Sumber : Diolah dari data Dipenda DIY*

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan BBNKB di Propinsi DIY selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 1,10%. Ini berarti rata-rata dari target yang ditetapkan 110% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain rata-rata realisasi penerimaan BBNKB 10% lebih besar dari target setiap tahunnya.

Selama periode pengamatan menunjukkan pemuangutan dari BBNKB dilihat dari tingkat efektifitas secara keseluruhan juga telah mencapai target, kondisi pencapaian target ini disebabkan karena sudah mulai adanya upaya peningkatan pelayanan, dilaksanakannya penyuluhan, lebih eratnya kemitraan dengan pengusaha otomotif, dan adanya peningkatan daya beli masyarakat karena adanya fasilitas kredit dari Bank maupun badan-badan perkreditan swasta, didukung juga dengan keluarnya produk-produk kendaraan bermotor yang bervariasi sehingga menarik minat masyarakat.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Propinsi lain antara lain Propinsi Bali dan Propinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dibawah ini :

#### 1. Propinsi Bali

Propinsi Bali dalam nilai efektifitas PKB selama 5 tahun dari tahun 1996/1997-2000 mencapai 1,16%, nilai ini tidak berbeda jauh dengan nilai efektifitas PKB Propinsi DIY yang mencapai 1,06%, nilai tersebut telah termasuk mencapai target namun Propinsi Bali mencapai 10% diatas Propinsi DIY, nilai rata-rata pertahun Propinsi DIY masih dapat dikatakan semua mencapai target sedangkan Propinsi Bali ditahun 1998/1999 hanya mencapai nilai 0,96% yang artinya belum mencapai target. Disektor BBNKB Propinsi Bali mencapai nilai yang jauh sekitar 46% diatas nilai efektifitas BBNKB Propinsi DIY yang hanya 1,10%, walaupun terdapat dua tahun yaitu tahun 1997/1998 dan 1998/1999 yang tidak mencapai target tetapi didua tahun terakhir yaitu tahun 1999/2000 dan 2000 Propinsi Bali mencapai angka yang signifikan menaik hingga 2,62% dari target tercapai dikarenakan di tahun 1999/2000 dan 2000 penetapan target yang tidak terlalu besar.

#### 2. Propinsi Kalimantan Barat

Propinsi Kalimantan Barat selama tahun 1990/1991-1994/1995 mencapai nilai rata-rata efektifitas 1,04%, nilai ini juga tidak jauh berbeda 0,2% diatas Propinsi DIY, nilai pertahun dari Propinsi Kalimantan Barat terdapat dua tahun yang tidak mencapai target yaitu tahun 1991/1992 dan 1992/1993 masing-masing 0,97% dan 0,90%, sedangkan Propinsi DIY nilai pertahun telah mencapai target, namun di Propinsi Kalimantan Barat hingga mencapai 1,10% ditahun 1993/1994 dan ,17% ditahun

1994/1995 karena target yang ditetapkan tidak terlalu besar sehingga mencapai angka tersebut. Disektor BBNKB juga tidak jauh berbeda namun Propinsi DIY masih dibawah angka 0,3% dibawah Propinsi Kalimantan Barat yaitu 1,13% dengan alasan hampir sama dengan PKB yang ditetapkan tidak terlalu besar namun dalam realisasi mencapai angka jauh diatas target.

#### 5.4. Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Perhitungan efisiensi PKB berkenaan langsung dengan biaya pemungutan atau biaya operasional untuk merealisasikan pajak tersebut, Tabel 5.7. dibawah ini menunjukkan realisasi biaya pemungutan PKB Propinsi DIY selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001.

**Tabel 5.7.**  
**Realisasi Biaya Pemungutan PKB Propinsi DIY**  
**Tahun Anggaran 1997/1998-2001**  
**(dalam Milyar)**

Tahun	RPKB+PRT+PRD	RPPD+RRD	RBIDp	PKB
1997/1998	22,451	55,73	8,37	3,37
1998/1999	23,605	35,35	6,45	4,30
1999/2000	30,162	51,87	8,29	4,82
2000	35,443	76,85	9,79	4,51
2001	47,710	146,24	9,18	3,64
Rata-rata	31,874	73,20	8,41	4,12

Sumber : Diolah dari data Denda dan BPS DIY

Dari perhitungan realisasi biaya pemungutan PKB, selanjutnya dapat ditentukan tingkat derajat efisiensi PKB selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001 seperti dalam tabel 5.8. dibawah ini :

**Tabel 5.8.**  
**Derajat Efisiensi Pemungutan PKB Propinsi DIY**  
**Tahun 1997/1998-2001**

Tahun	Nilai Efisiensi
1997 / 1998	6,66
1998 / 1999	5,48
1999 / 2000	6,25
2000	7,85
2001	13,10
Rata-rata	7,86

*Sumber : Diolah dari data Dipenda DIY*

Hasil pengolahan data diatas menunjukkan nilai efisiensi pemungutan PKB di Propinsi DIY selama periode 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 7,86%. Nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat menghasilkan penerimaan PKB sebesar 7,86% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya pemungutan total dapat menghasilkan Rp. 7,86,- penerimaan PKB.

Hasil yang diperoleh dari pengamatan atas efisiensi pemungutan PKB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1997/1998-2001 terjadi peningkatan efisiensi. Pada tahun anggaran 1998/1999 efisiensi Dipenda mengalami penurunan, tetapi kemudian terjadi kenaikan pada tahun anggaran 1999/2000 yang ditunjukkan dengan naiknya nilai rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya, dari tahun anggaran 1998 sebesar 5,48% menjadi 6,25% pada tahun 1999 dan 7,85% pada tahun 2000 hingga menjadi 13,10% pada tahun 2001. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan PKB di Propinsi DIY adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

### 5.5. Efisiensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Untuk melihat perhitungan proporsi realisasi biaya pemungutan dari BBNKB, maka dapat dilihat seperti dalam tabel 5.9. dibawah ini :

**Tabel 5.9.**  
**Realisasi Biaya Pemungutan BBNKB Propinsi DIY**  
**Tahun Anggaran 1997/1998-2001**  
**(dalam Milyar)**

Tahun	RBBNKB+PRT+PRD	RPPD+RRD	RBDp	PRB
1997/1998	30,435	55,73	8,37	4,57
1998/1999	11,212	35,35	6,45	2,04
1999/2000	11,742	51,87	8,29	1,87
2000	38,980	76,85	9,79	4,96
2001	67,208	146,24	9,18	5,13
Rata-Rata	31,915	73,20	8,41	3,71

Sumber : Diolah dari data Dipenda dan BPS DIY

Berdasarkan perhitungan proporsi realisasi biaya dan realisasi penerimaan, kemudian ditentukan tingkat derajat efisiensi pemungutan BBNKB selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001 seperti disajikan dalam Tabel 6.0. dibawah ini :

**Tabel 6.0.**  
**Derajat Efisiensi Pemungutan BBNKB Propinsi DIY**  
**Tahun 1997/1998-2001**

Tahun	Nilai Efisiensi
1997 / 1998	6,65
1998 / 1999	5,49
1999 / 2000	6,27
2000	8,06
2001	13,10
Rata-rata	7,91

Sumber : Diolah dari data Dipenda DIY

Dari hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai efisiensi dalam pemungutan BBNKB di Propinsi DIY selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 7,91%. Nilai ini ternyata relatif sama dengan nilai efisiensi pemungutan PKB. Angka ini kelihatannya menunjukkan indikasi bahwa proporsi hasil capai/realisasi (output) adalah berbanding sama dengan proporsi output PKB terhadap biaya (input) yang dipergunakan, menghasilkan penerimaan BBNKB sebesar 7,91% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp. 1,- biaya pemungutan total dapat menghasilkan Rp. 7,91,- penerimaan BBNKB.

Hasil pengamatan atas efisiensi pemungutan BBNKB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1997/1998-2001 adanya peningkatan efisiensi. Pada tahun anggaran 1998 terlihat efisiensi Dipenda mengalami penurunan yakni dari nilai 6,65% pada tahun anggaran 1997 menjadi 5,49% pada tahun anggaran 1998, tetapi kemudian terjadi kenaikan pada tahun anggaran 1999 yang ditunjukkan dengan naiknya nilai rasio hasil/realisasi penerimaan (output) terhadap biaya dari tahun anggaran 1998 sebesar 5,49% menjadi 6,27% pada tahun anggaran 1999 dan 8,06% pada tahun anggaran 2000 hingga menjadi 13,10% pada tahun anggaran 2001. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan BBNKB di Propinsi DIY adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

Pengamatan data sebagai bahan perbandingan antar Propinsi antara lain Propinsi Bali dan Propinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dibawah ini :

### 1. Propinsi Bali

Propinsi Bali dalam nilai efisiensi rata-rata dari tahun 1996/1997-2000 mencapai nilai 8,91% yang masih diatas Propinsi DIY hanya mencapai nilai 7,86%, dilihat nilai pertahunnya Propinsi Bali juga tidak ada penurunan seperti Propinsi DIY yang turun pada tahun 1998, atau bisa dikatakan biaya pemungutan Propinsi Bali tidak terlalu besar melainkan realisasi PKB yang mencapai diatas target, sama halnya dengan sektor BBNKB Propinsi Bali, nilai tersebut sama dengan nilai efisiensi PKB yaitu 8.91% dengan alasan yang serupa yaitu realisasi BBNKB yang mencapai diatas target.

### 2. Propinsi Kalimantan Barat

Nilai efisiensi PKB Propinsi Kalimantan Barat rata-rata mencapai 5,84% dari tahun 1990/1991-1994/1995, nilai ini jauh diatas nilai efisiensi Propinsi DIY yang mencapai 7,86%, hal ini dikarenakan perbedaan tahun yang sangat tajam dan juga biaya-biaya yang dipergunakan untuk pemungutan tahun penelitian di Propinsi Kalimantan Barat masih belum terlalu maksimal, hal yang sama juga ada pada sektor BBNKB Propinsi Kalimantan Barat, nilai efisiensi BBNKB sama dengan PKB yaitu 5,84% dengan alasan yang sama juga.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dianalisis oleh penulis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Propinsi DIY memang telah menjadi kota pelajar sejak lama, dengan bergulirnya waktu terlihat ada banyak perubahan di Propinsi DIY, dampak nyata adalah banyaknya para pelajar dan mahasiswa menimba ilmu dikota tersebut, untuk mendukung kegiatan dari para pelajar dan mahasiswa tersebut digunakan sepeda motor yang fungsinya memang sederhana dan berguna, data menunjukkan kontribusi dari PKB dan BBNKB terhadap PAD Propinsi DIY rata-rata mencapai 80% selama periode pengamatan dengan tingkat masing-masing bagian dari PKB adalah 44,27% dan dari sektor BBNKB adalah 38,39%. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan Propinsi DIY dari sektor pajak memang didominasi oleh PKB dan BBNKB yang dikarenakan hal-hal tersebut diatas dan dari penerimaan lainnya memang kurang berpotensi, selain itu PKB dan BBNKB telah menjadi wewenang dari tingkat Propinsi.
2. Pengamatan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DIY dalam kurun waktu 1997/1998-2001 relatif efektif, secara keseluruhan tingkat efektifitas telah mencapai target, kondisi pencapaian target ini karena makin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, tingkat



efektifitas dari PKB selama tahun anggaran 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 1,06%, ini berarti dari target yang ditetapkan 106% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain realisasi penerimaan PKB 6% lebih besar dari target, sedangkan tingkat efektifitas dari BBNKB rata-rata sebesar 1,10%, ini berarti rata-rata dari target yang ditetapkan 110% dapat direalisasikan oleh Dipenda atau dengan kata lain realisasi penerimaan BBNKB 10% lebih besar dari target, hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya untuk menjadi lebih baik dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Pengamatan terhadap efisiensi pemungutan PKB menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 1997/1998-2001 terjadi peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan naiknya nilai rasio atau realisasi penerimaan (output) terhadap biaya pemungutan, nilai efisiensi pemungutan PKB di Propinsi DIY selama periode 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 7,86%, nilai ini berarti bahwa rata-rata dari biaya yang dipergunakan dapat menghasilkan penerimaan PKB sebesar 7,86% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain bahwa setiap Rp.1,- biaya pemungutan total dapat menghasilkan Rp.7,86,- penerimaan PKB, sama halnya dengan BBNKB terjadi peningkatan efisiensi, nilai efisiensi pemungutan BBNKB di Propinsi DIY selama periode tahun anggaran 1997/1998-2001 rata-rata sebesar 7,91%, nilai ini menghasilkan penerimaan BBNKB sebesar 7,91% lebih besar dari biaya atau dengan kata lain setiap Rp.1,- biaya pemungutan total dapat menghasilkan

Rp.7,91,- penerimaan BBNKB. Keadaan ini semua menunjukkan bahwa pemungutan PKB dan BBNKB di Propinsi DIY adalah efisien dari tahun ke tahun selama periode pengamatan.

## **6.2. Saran**

1. Penerimaan sektor PKB dan BBNKB di Propinsi DIY berperan sangat dominan dalam PAD, diharapkan dari penerimaan tersebut digunakan sebenar-benarnya untuk kebutuhan dana daerah dalam melaksanakan pembangunan dan realisasi dari pelaksanaan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Pemungutan PKB dan BBNKB diharapkan dapat terus berjalan sesuai keinginan para wajib pajak dengan konsekuensi ada timbal balik dari wajib pajak untuk tetap memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya.
3. Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan target PKB dan BBNKB Propinsi DIY, perlu dilakukan penetapan target sesuai dengan potensi.
4. Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, maka pemerintah Propinsi DIY diharapkan mampu untuk menambah panjang jalan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat atas kesediaan mereka membayar pajak.
5. Penulis berharap untuk peneliti selanjutnya agar dapat menghitung potensi dari berbagai merk kendaraan, isi silinder (cc), dan tipe kendaraan.